

Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi

Latar Belakang dan Urgensi Penelitian

Buku ini mengkaji dampak kebijakan belanja pemerintah di sektor pendidikan selama kurun waktu 10 tahun (2006-2015), dengan fokus lokasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Fenomena yang diangkat adalah terjadinya kenaikan anggaran belanja pendidikan yang sangat signifikan di tingkat kabupaten/kota (mencapai 90%-100%) karena adanya program pendidikan gratis. Namun, kenaikan anggaran tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan indikator sosial ekonomi secara optimal, seperti angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah serta angka kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi.

Pendidikan untuk Semua (Education for All) dan Investasi SDM

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan faktor penentu utama yang mendorong pertumbuhan suatu bangsa. Sesuai amaran UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003, pendidikan harus bersifat egaliter dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi kelas sosial, geografis, maupun ekonomi (education for all). Mengabaikan pengembangan modal manusia akan berdampak buruk pada produktivitas dan kehidupan bermasyarakat.

Masalah Pokok Pendidikan di Indonesia

Masalah pertama, masalah pemerataan pendidikan akibat keterbatasan aksesibilitas dan sarana dan prasarana sekolah di daerah terpencil. Kedua, rendahnya mutu dan relevansi pendidikan yang dipicu oleh kurikulum yang kaku serta kualitas tenaga pengajar yang belum merata. Ketiga, masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan yang belum optimal, sehingga lulusan yang dihasilkan kurang siap kerja dan memunculkan tingginya pengangguran.

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Realita di Lapangan

Sebesar 80% - 85% anggaran habis digunakan untuk membiayai belanja pegawai, seperti gaji pendidik, tenaga kependidikan, serta tuntutan profesi atau sertifikasi guru. Sebaliknya, anggaran untuk belanja modal dan operasional non-gaji hanya berkisar 15% - 25% saja pertahun.

Dampak Terhadap Kinerja Pendidikan dan Indikator Ekonomi

Akibat postur anggaran yang didominasi belanja pegawai, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berjalan sangat lambat. Hanya daerah perkotaan seperti kota Makassar, Pare-pare, dan Pare yang mencapai angka RLS tertinggi (sekitar 9,9 hingga 10 tahun). Sebaliknya, sebagian besar kabupaten lainnya masih berada dibawah target nasional dengan rata-rata RLS hanya 5-7 tahun.